BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan, *freedom* (Inggris) atau *hurriyah* (Arab) merupakan bagian penting manusia dalam membangun kehidupan yang memiliki kedaulatan dari semua sektor kehidupan. Hal tersebut juga menjadi bagian penting dalam konsep dasar keadilan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945¹. Penting kedaulatan dalam kemerdekaan memberikan aspirasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang damai dan di ridhoi Allah Swt. Sebagaimana yang dijelaskan Driyarkara dalam kutipan dari Jazim Hamidi bahwa subjek yang merdeka itu harus punya kekuasaan untuk menguasai diri sendiri dan perbuatannya yang tidak berlawanan dengan kodrat kemanusiaan².

Upaya pembangunan tidak dapat lepas dari pembangunan ekonomi melalui berbagai sektor dan kelembagaan. Menurut Fahmi bahwa kedaulatan ekonomi rakyat merupakan kedaulatan mendasar³. Hal tersebut juga memberikan pandangan dalam ranah kelembagaan dimana perusahaan merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba⁴. Perusahaan dapat mengembangkan kegiatan usahanya apabila di dukung dengan modal yang

¹ Lukman Surya Saputra, *Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*, (Jakarta: Purna Setia Inves, 2007), hlm. 36

² Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya* (Jakarta: Gramedia, 2010) hlm. 5

³ Fahmi Radhi, *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 36

⁴ Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012), Hlm. 15

cukup. Modal dapat diperoleh dengan meminjam atau memakai modal dari pihak lain sebagai cara untuk meningkatkan keuntungan yang , baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu⁵. Apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka untuk mempertahankan usahanya tersebut pengusaha (debitor) dapat melakukan pinjaman modal yang dibutuhkan kepada pihak lain (kreditor).

Kegiatan peminjaman modal merupakan bentuk dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam yang melibatkan antara peminjam (debitor) dengan yang meminjamkan (kreditor). Perjanjian tersebut menjelaskan peristiwa ketika seorang berjanji untuk melaksanakan kegiatan peminjaman modal⁶. Didalam menjalankan usahanya, pengusaha membutuhkan modal, baik berupa barang-barang ataupun berupa uang. Keadaan suatu perusahaan tidaklah selalu berjalan dengan baik dan terkadang mengalami kesulitan dibidang keuangan sehingga perusahaan tersebut tidak sanggup lagi membayar hutangnya.

Dalam prosesnya, kreditor memberikan pinjaman kepada debitor didasarkan bahwa kreditor percaya kepada debitor dapat membayar atau mengembalikan utang tepat pada waktunya. Namun realita yang terjadi pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor tidak selalu berjalan sesuai dengan perjanjian. Debitor tidak membayar utangnya kepada kreditor meskipun telah jatuh tempo atau waktu, bahkan sampai melarikan diri dari hutang yang ditanggungnya. Dalam

⁵ digilib.unila.ac.id diakses tanggal 7 juni 2018 pukul 14.00

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju,2000), Hlm.4

ranah hukum diantara pelaksanaan peminjaman modal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dikenal dengan *wanprestasi*⁷.

Prinsip dasar wanprestasi juga termaktub dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1338 dan Pasal 1320. Dalam Pasal 1338 dinyatakan “(1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; (2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang; (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik Dalam pasal 1320 disebutkan “(1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak; (2) kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; (3) adanya objek; (4) Adanya kausa halal⁸.”

Seiring dengan dinamika kreditor dan debitor pada persoalan utang piutang, muncul problematika krisis moneter secara nasional yang berimplikasi pada kebangkrutan dunia usaha dengan masalah utang piutang . Karenanya perlu ada aturan yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan debitor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil⁹. Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang Penundaan

⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hlm.98. secara khusus wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak secara khusus wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.

⁸ KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Dan KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), (Pustaka Buana, Cetakan II, 2015), Hlm.295-298

⁹ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), Hlm.2-3

Kewajiban Pembayaran Utang seperti dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kemudian dalam BAB III Pasal 222 sampai Pasal 294, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang membahas tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam tata aturan tersebut dijelaskan bahwa PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut¹⁰. PKPU juga dapat dimohonkan oleh debitor/kreditor yang mengalami permasalahan dalam hal utang-piutang.

Dalam kasus penundaan pembayaran memiliki implikasi pada ranah debitor yang berada dalam keadaan sulit untuk memenuhi (membayar) utangnya secara penuh, misalnya perusahaan debitor pada saat itu menderita kerugian, kebakaran yang menimpa pabrik, *resensi* ekonomi, dan peristiwa *overmacht*¹¹. Kesulitan debitor tersebut belum menjadi indikasi kearah kepailitan. Apabila debitor diberikan waktu mengevaluasi kinerja usahanya. debitor dapat memohon penundaan pembayaran dengan tujuan agar bisa memperbaiki ekonomi dan

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti,2014), Hlm.175

¹¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta,2002), Hlm.102

perusahaan yang terjebak dengan situasi diatas¹². Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan sebelum debitor dinyatakan pailit, sebab apabila PKPU diajukan setelah debitor dinyatakan pailit, hal ini tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, PKPU harus diajukan sebelum debitor dinyatakan bangkrut¹³.

Proses hal tersebut dimaksudkan juga untuk mengajukan rencana perdamaian (*accord*) yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor¹⁴. Kemudian kreditor juga memberikan saran penguat agar debitor tersebut diberi penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga pada akhirnya ia dapat melunasi utang utangnya¹⁵. Selain itu penundaan dimaksud memberikan solusi sampai debitor yang dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga dapat menyelesaikan utangnya tersebut¹⁶.

Penggalian atas hal itu juga memberikan waktu (*timing*) kepada debitor untuk merestrukturisasi utangnya bahkan mungkin merorganisasi perusahaannya, maka besar pula kemungkinan debitor dapat melanjutkan usahanya kembali, Manfaat bagi kreditor memberikan wilayah evaluasi untuk debitor yang diberikan PKPU agar berkesempatan memperbaiki kinerja atau mengatasi kesulitan ekonomi keuangannya, maka kreditor kemungkinan besar akan memperoleh pembayaran piutang secara penuh, sehingga tidak merugikan para kreditor. Dari

¹²Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, hlm. 102

¹³ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta:Softmedia, 2010), Halm.202

¹⁴Pasal 222 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

¹⁵ Pasal 222 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

¹⁶Annalisa, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang)*, (Palembang:Universitas Sriwijaya,2007), Hlm.153

manfaat PKPU tersebut sudah banyak perkara yang menempuh dengan jalan mengajukan permohonan ke pengadilan niaga guna menyelesaikan masalah agar tidak merugikan kedua belah pihak seperti contoh-contoh kasus berikut:

1. Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari PT.Modern Sevel Indonesia(PT MSI) pemegang lesensi gerai 7-eleven di Indonesia. Adapun permohonan PKPU diajukan oleh dua suplier makanan minuman,PT Soejah Bali dan PT Kumiamitra Duta Sentosa¹⁷.
2. (PKPU) dikabulkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri terkait permohonan yang diajukan oleh jemaah First Travel. Majelis hakim menilai bahwa permohonan PKPU jemaah First Travel sudah memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam pasal 222 ayat 1 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimana jumlah kreditor yang terutang oleh First Travel lebih dari satu orang. Dengan adanya putusan permohonan PKPU ini dinilai dapat menyelamatkan nasib para jamaah First Travel¹⁸.
3. pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terkait permohonan yang diajukan oleh PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Dengan putusan tersebut, maskapai pelat merah tersebut tidak berstatus pailit dan dipastikan bisa kembali terbang¹⁹.

¹⁷ Kompas , Edisi II, 11 September 2017, Hlm.5

¹⁸Abdul Aziz,"*PKPU First Trevel: Tak Mudah Ambil di Bareskrim*". Tirto. II. 5 September 2017,Hlm .8

¹⁹ Kompas, Edisi IV,14 November 2018,Hlm 3

Dari ketiga contoh perkara di atas para pihak kreditor maupun debitor sama-sama mempunyai keuntungan masing-masing. Tetapi yang lebih diuntungkan dari ketiga perkara diatas adalah debitor. Dengan adanya PKPU, perusahaan yang telah mengajukan permohonan ke Pengadilan, amar putusan yang di dapat perusahaan milik debitor terhindar dari pailit.

Dari data awal tersebut dan hubungannya dengan konstruksi syariat Islam yakni orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil Al-qur'an yang berkaitan dengan di syariatkan utang piutang ialah seperti dalam QS. Al-Baqarah(2) : 245²⁰:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Dari ayat tersebut Allah menjelaskan keutamaan orang yang memberikan pinjaman karena Allah, akan dilipat gandakan pahala orang memberikan pinjaman dengan baik kepada orang yang membutuhkan. Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun

²⁰Terjemah QS. Al-Baqarah(2) : 245”siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Maka utang piutang atau meminjam modal untuk tujuan produktif (usaha), Islam menentukan perjanjian kerjasama (*syirkah*) dalam usaha yakni *syirkah mudharabah* atau *Al-Mudharabah*.

Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shabibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan, sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik modal jika kerugian bukan akibat kelalaian si pengelola²¹.

Pihak pengelola (*mudharib*) yang berutang atau meminjam modal kepada pemilik modal (*shabibul mal*) wajib membayar atau melunasi utang sesuai dengan jumlah dana yang ia utangkan kepada *shabibul mal*. Apabila waktu pelunasan utang setelah jatuh tempo, maka *mudharib* wajib membayar utangnya kepada *shabibul mal*. Apabila memperlambat atau menunda membayar utang bagi yang mampu membayar utangnya merupakan suatu kezhaliman. Sedangkan pihak *mudharib* belum mampu melunasi utangnya, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *shabibul mal* memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan agar dapat melunasi utangnya.

Permasalahan yang sering terjadi antara *mudharib* dan *shabibul mal* adalah *mudharib* menunda membayar utang yang telah jatuh tempo, sehingga *shabibul mal* harus memperpanjang waktu pelunasan utang agar *mudharib*

²¹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hlm. 181.

membayar utangnya dan tidak merugikan banyak pihak. Berdasarkan masalah tersebut, erat kaitannya dengan perkara Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst.) dikarenakan debitor (*mudharib*) menunda pembayaran utang sehingga pihak kreditor (*shabibul mal*) mengajukan PKPU untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan. Adapun yang menarik dalam perkara ini sehingga penulis membahas perkara dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst.) karena pada umumnya yang mengajukan perkara tersebut ke PKPU banyak dilakukan oleh debitor, tetapi dalam perkara ini yang mengajukan adalah kreditor, karena hakim tidak menolak permohonan PKPU oleh kreditor apabila kreditor dapat membuktikan bahwa debitor diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya ketika utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih. Secara teoritis, dengan cara memperpanjang waktu pelunasan utang, debitor berupaya dapat melunasi utangnya agar perusahaan yang dijalankan tidak pailit dan merugikan banyak pihak.

Telaah awal diketahui proses PKPU dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst. ke Pengadilan Niaga Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2014 ini melibatkan PT. Netwave Multi Media sebagai vendor²² yang menyediakan infrastruktur telekomunikasi (selanjutnya disebut sebagai pemohon) dan PT. Bakrie Telkom Tbk pihak penyewa infrastruktur telekomunikasi (selanjutnya disebut sebagai termohon). Hubungan hukum yang mengikat pemohon dengan termohon yaitu adanya perjanjian sewa-menyewa induk kerjasama penyediaan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi untuk

²² Vendor adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia bisnis. Vendor disebut juga sebagai supplier atau penjual.

penempatan perangkat telekomunikasi. Berdasarkan perjanjian sewa infrastruktur komunikasi tersebut, timbul kewajiban pembayaran oleh termohon selaku penyewa infrastruktur telekomunikasi kepada pemohon. Pemohon menyediakan infrastruktur telekomunikasi sejak tahun 2009. Namun sejak masa sewa tahun 2012, termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Termohon berkawajiban melakukan pembayaran kepada pemohon berupa harga sewa untuk setiap lokasi infrastruktur telekomunikasi (selanjutnya disebut *site*). Pembayaran sewa *site* oleh termohon awalnya berjalan lancar, namun dikemudian hari termohon tidak lagi memenuhi kewajiban sehingga mendapatkan teguran baik secara tertulis maupun lisan dan mengadakan pertemuan dengan termohon untuk membahas mengenai kewajiban termohon. Dalam pelaksanaannya termohon tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar utang secara berkala sebagaimana yang telah disepakati. Permohonan PKPU diajukan oleh pemohon yang diketahui merupakan salah satu kreditor termohon. Untuk melindungi kepentingan dan memastikan termohon menyelesaikan pembayaran utang, pemohon mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga.

PKPU yang diajukan pemohon selanjutnya diterima oleh Pengadilan Niaga dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (2) UUK PKPU. Berdasarkan keadaan tersebut, termohon mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang sebagian atau seluruhnya kepada para kreditornya. Selanjutnya, rencana perdamaian yang diajukan dalam proses PKPU tersebut diterima dan disahkan menjadi perjanjian perdamaian (homologasi) oleh Pengadilan Niaga Jakarta.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mengangkat masalah tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilakukan oleh kreditor kepada debitor ditinjau dari Hukum Islam. Maka penulis menulis skripsi berjudul *Implementasi Undang-Undang Ri Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst)*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst) ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang penundaan kewajiban pembayaran hutang dalam putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Pada Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)
2. Menjelaskan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang penundaan kewajiban pembayaran hutang dalam putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dan Mahasiswa Jurusan Syariah khususnya Program Studi Ekonomi Syariah dalam bidang kajian Ekonomi Syariah.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang permasalahannya selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kepailitan dan kewajiban penundaan pembayaran utang.
- c. Sebagai bahan agar memahami lebih mendalam bagaimana penyelesaian sengketa utang piutang yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.
- d. Hasil penelitian menjadi bahan kajian dalam melihat upaya PKPU dalam memberi solusi bagi pihak yang belum mampu untuk membayar utang serta mencegah terjadinya kepailitan yang ditinjau secara teoritis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai pengembangan pengetahuan mengenai PKPU yang dapat dijadikan sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya kepailitan dalam dunia usaha atau perusahaan
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan

permasalahan pokok Hukum kepailitan dan khususnya upaya PKPU dalam mencegah terjadinya kepailitan.

- c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah bagi keustakaan UIN Raden Fatah Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Febri Yanti Casanova (2017) telah melakukan penelitian dengan judul skripsi *Analisis Putusan Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst)*. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) diajukan ke Pengadilan Niaga apabila debitor atau salah satu dari kreditor diperkirakan tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih PKPU dilakukan dengan mengajukan rencana perdamaian sebagai upaya dalam mencegah terjadinya kepailitan.²³

Yani Mulyaningsih (2010) telah melakukan penelitian dengan judul skripsi *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau Dari Hukum Islam* yang disimpulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di perbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam,sesuai Q.S Al-Baqarah ayat 280 dan hadits Rasulullah SAW

²³Febri Yanti Casanova, Skripsi: “ *Analisis Putusan Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kepailitan (Analisis Putusan No.59/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst)*.” Situs [Http://Digilib.Unila.Ac.Id](http://Digilib.Unila.Ac.Id) ,Diakses 7 Juni 2018 Pukul 14.00

memberi penangguhan pembayaran utang apabila orang yang berhutang mengalami kesulitan membayar utangnya²⁴.

Patih Perangin-Angin (2004) telah melakukan penelitian dengan judul skripsi *Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan Maanfaatnya Bagi Pihak Debitor Dan Kreditor (Studi Kasus Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)* yang disimpulkan bahwa pengajuan PKPU ini cukup bermanfaat sebagai upaya menghindarkan suatu perusahaan terhindar dari kepailitan, namun dengan beberapa segi hambatan antara lain ditemui masalah itikad baik debitor dalam pengajuan PKPU serta terkadang sulitnya mencapai kata sepakat dalam merumuskan rencana perdamaian (*composition plan*) yang nantinya disahkan oleh Putusan Pengadilan Niaga setempat, ditambah lagi kurang dipahaminya prinsip-prinsip restrukturisasi dan reorganisasi dalam perusahaan sehingga masih memungkinkan perusahaan yang telah mengajukan PKPU ini akhirnya diputus pailit melalui keputusan Pengadilan Niaga Setempat²⁵.

Dari penelitian tersebut penulis belum menemukan penelitian skripsi berkaitan dengan PKPU dalam studi kasus (No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst.) yang di tinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini memiliki kesamaan,yakni mengkaji tentang PKPU sebagai cara yang efesien untuk

²⁴ Yani Mulyaningsih, Skripsi: “*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau Dari Hukum Islam*” (Palembang:UIN Raden Fatah Palembang,2010).

²⁵Patoh Perangin-angin, tesis : *Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan Maanfaatnya Bagi Pihak Debitor Dan Kreditor (Studi Kasus Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)*. Situs <http://library.usu.ac.id> diakses 21 juni 2010, pukul 19.00 wib

menyelesaikan masalah utang. Namun dalam penulisan skripsi ini lebih menekankan pada penyelesaian utang studi kasus (No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst.) dengan cara PKPU dikaji dengan hukum Islam.

Persamaan dan perbedaan tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian

Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
Febri yanti casanova. 2017. Analisis Putusan Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst). Skripsi. Universitas Negeri Lampung.	Objek penelitian sama, menganalisis putusan .	Peneliti terdahulu fokus pada jenis putusan homologasi yang ditetapkan hakim Pengadilan Niaga.	Peneliti menganalisis putusan homologasi dalam PKPU sebagai upaya mencegah terjadi pailit.
Yani, Mulyaningsih. 2010. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban	Sama terkait dengan PKPU dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 .	Peneliti terdahulu fokus pada PKPU yang ditinjau dari Hukum Islam.	Peneliti berasumsi bahwa PKPU diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam

Pembayaran Utang Ditinjau Dari Hukum Islam. Skripsi UIN Raden Fatah Palembang.			jika tidak bertentang dengan Al-Qur'an dan Hadits.
Patih, Perangin-Angin. 2004. Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan Manfaatnya Bagi Pihak Debitor Dan Kreditor (Studi Kasus Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat). Skripsi. Universitas Sumatera Utara.	Sama terkait penerapan PKPU	Peneliti terdahulu fokus pada PKPU yang ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan dan manfaatnya bagi debitor dan kreditor.	Peneliti berasumsi bahwa pengajuan PKPU bermanfaat menghindari kepailitan, tetapi ada beberapa hambatan untuk mencapai perdamaian yang akan disahkan oleh pengadilan.

Sumber data : didapat dari berbagai penelitian terdahulu

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah

penelitian hukum doktriner disebut juga penelitian perpustakaan (*library research*) atau studi dokumen. *Library research*, adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun ditempat lain.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis data kualitatif (*qualitative date*), yaitu data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pada Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai hukum mengikat²⁶. Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar yaitu *al-Qur'an*, *Hadits*, dan *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum*

²⁶Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta,2007) Hlm.103

Perdata) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata).

- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas atau memberikan penjelasan bahan primer²⁷. Bahan hukum sekunder seperti *tafsir Al-Qur'an, tafsir hadits, penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang, Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Fiqih Muamalah, Fiqh Kontekstua.*
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder²⁸. Bahan hukum tersier misalnya *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum Islam , Ensiklopedia Musim, internet, kamus, majalah dan sebagainya.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, internet, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pada Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst).

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif* (menggambarkan,

²⁷ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm.103

²⁸ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm.104

menguraikan serta menyajikan teknik analisis masalah yang ada). Kemudian di simpulkan secara *deduktif* yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat di pahami dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah pembahasan yang disusun sedemikian rupa agar dalam penulisan dapat terarah dan terorganisasi secara sistematis sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Susunan pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, permasalahan (identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah), tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif, dalam bab ini akan menguraikan tinjauan umum tentang kepailitan dan PKPU , perikatan dan perjanjian, meliputi pengertian kepailitan dan PKPU, ,dasar hukum kepailitan, asas-asas hukum kepailitan, para pihak dalam kepailitan, berakhirnya kepailitan, syarat-syarat PKPU,maksud dan tujuan PKPU, pihak yang berhak mengajukan dan perbedaan kepailitan dan PKPU.

BAB III Telaah Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan Pengadilan No.59/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum mengenai bagaimana

implementasi Undang-Undnag RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam persfepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus.PKPU/2014.PN.Niaga.Jkt.Pst)

BAB IV Kesimpulan dan Saran, kesimpulan merupakan bagian yang berisikan tentang apa saja yang telah penulis paparkan dari bab-bab sebelumnya yang berkenaan dengan masalah dalam skripsi, sedangkan saran merupakan solusi dari permasalahan dalam skripsi ini.